



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.30 WIB s.d 12.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Membahas Mengenai Koordinasi Dan Integrasi Moda Transportasi
Di Jabodetabek
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, S.E.,M.BA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota : dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
Kementerian Perhubungan beserta Badan Usaha/Operator
Transportasi Di Jabodetabek.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan beserta Badan Usaha/Operator Transportasi di Jabodetabek pada hari ini adalah membahas mengenai koordinasi dan integrasi moda transportasi di Jabodetabek.
3. Ketua Rapat mempersiapkan kepada Kepala BPTJ untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersiapkan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT..../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI mendukung peningkatan peran BPTJ Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas dan menambah kuantitas transportasi umum massal di Jabodetabek.
2. Komisi V DPR RI mendesak BPTJ Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan secara fisik dan sistem ticketing seluruh moda transportasi yang terdapat di Jabodetabek baik angkutan umum berjadwal teratur dan angkutan umum tidak berjadwal tidak teratur.
3. Terkait dengan masih banyaknya kemacetan di Jabodetabek, Komisi V DPR RI meminta agar BPTJ Kementerian Perhubungan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan mengkaji kembali penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas yang selama ini kurang memberikan hasil yang memadai.
4. Komisi V DPR RI meminta BPTJ Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan bertransportasi di Jabodetabek.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 8 Maret 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK,



BAMBANG PRIHARTONO

KETUA RAPAT,



MUHIDIN M. SAID